

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Evaluasi pengelolaan keuangan pemerintah Kota Semarang ini bertujuan untuk mewujudkan *good governance* dan *clean governance*. Potret dari evaluasi pengelolaan keuangan pemerintah Kota Semarang dapat dilihat dari pengelolaan keuangan urusan wajib dan urusan pilihan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang tahun 2011-2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kota Semarang. Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan pemerintah Kota Semarang melibatkan aktor-aktor yang berperan penting dalam keberhasilan pencapaian tujuan. Aktor-aktor yang terlibat adalah semua SKPD Kota Semarang, Bappeda Kota Semarang, Sekretariat Daerah Kota Semarang, TAPD, BPKAD, DPRD Kota Semarang, Inspektorat Kota Semarang, BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Walikota Semarang. Dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan materi/jenis yang harus disampaikan oleh masing-masing instansi meliputi laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan (CaLK), surat pertanggungjawaban (SPJ). Selama 2011-2015 ini dalam urusan waktu pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan. Pemerintah Kota Semarang sudah melaksanakannya sesuai dengan peraturan.

2. Pemerintah Kota Semarang melaksanakan 26 urusan wajib yang meliputi pendidikan; kesehatan; Pekerjaan Umum; Perumahan; Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan; Perhubungan; Lingkungan Hidup; Pertanahan; Kependudukan dan Catatan Sipil; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Sosial; Ketenagakerjaan; Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah; Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah; Penanaman Modal; Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; Otonomi Daerah Pemerintahan Umum; Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; Ketahanan Pangan; Pemberdayaan Masyarakat; Statistik; Kearsipan; Komunikasi dan Informatika; Perpustakaan.

Pengelolaan keuangan pemerintah Kota Semarang urusan wajib dari 26 urusan ada beberapa urusan wajib yang persentase realisasi anggarannya dibawah rata-rata yaitu urusan pendidikan; pekerjaan umum; penataan ruang; otonomi daerah pemerintahan umum administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. Pemerintah Kota Semarang melaksanakan 7 urusan pilihan yang meliputi : Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Pariwisata; Kelautan dan Perikanan; Perdagangan; Perindustrian. Dari ketujuh urusan pilihan tersebut urusan pilihan energi dan sumber daya mineral realisasi anggarannya dibawah rata-rata.

3. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi adanya ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi dalam urusan wajib dan urusan pilihan yaitu peraturan/kebijakan, keadaan darurat, kebijakan kepala daerah, politik.

B. Saran

1. Peraturan/kebijakan yang dibuat harus berorientasi untuk kepentingan umum dan berjalannya proses pemerintahan berdasarkan skala prioritas. Kebijakan harus dibuat secara jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam penerapannya.
2. Penanganan/pemenuhan kebutuhan kondisi darurat harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan pertanggungjawabannya harus diungkapkan secara adil dalam LKPD maupun LKPJ.
3. Harus ada sinkronisasi dalam hal visi, misi, program dan kegiatan saat pergantian kepala daerah. Kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan kebutuhan dan tidak boleh melanggar peraturan yang berlaku di atasnya.
4. Anggaran yang ditetapkan harus sesuai dengan prioritas kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku bukan untuk kepentingan politik.
5. Penelitian yang dilakukan mengenai pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kota Semarang ini masih ada kekurangan dengan segala keterbatasan penulis. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya diadakan penelitian lebih lanjut dan mendalam tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah dengan objek penelitian yang diperluas menjadi beberapa kota ataupun kabupaten dan

mengeksplor lebih dalam tentang faktor-faktor yang berpengaruh agar bisa diperbandingkan dengan penelitian sebelumnya.